

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

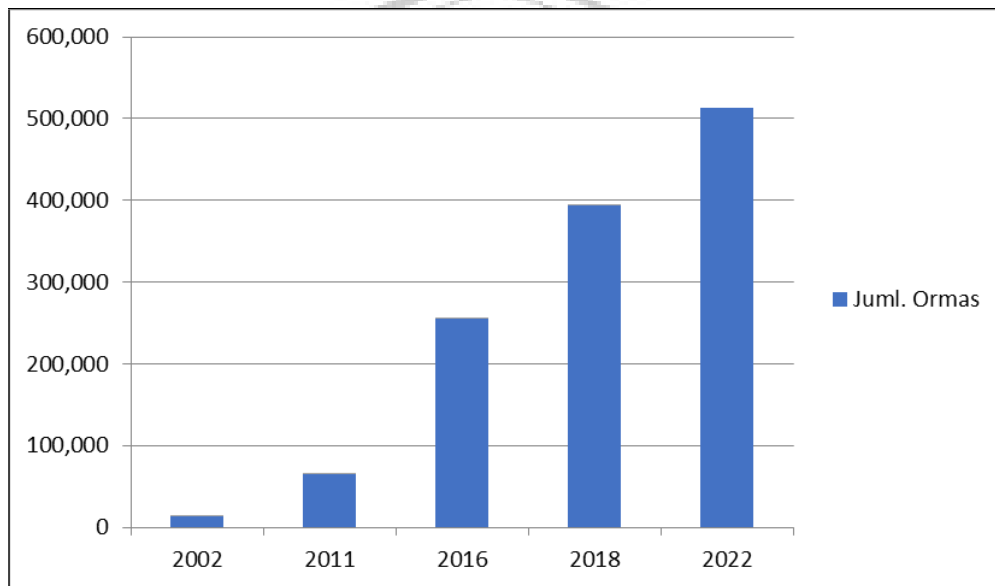
Organisasi yang didirikan secara bebas oleh masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan bekerja menuju tujuan NKRI dengan didasari nilai-nilai Pancasila akrab disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Ada kesamaan kebutuhan, keinginan, minat, aktivitas, dan tujuan yang menjadi landasan organisasi. Kelompok masyarakat dikendalikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kelompok Masyarakat; organisasi kemasyarakatan dahulu diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Sulthan Alfaraby & Syafrina Sari Lubis, 2022).

Pengertian organisasi kemasyarakatan juga telah diutarakan oleh (Maknun et al., 2022) yang mana menurutnya organisasi masyarakat merupakan *“an association held jointly by a group of people on the basis of the same will, needs, aspirations, motivational impulses and similar activities in the context of realizing state development and the fulfillment of state ideals based on Pancasila”*. Menurutnya Pengaruh dan partisipasi ormas tidak dapat dipungkiri, terutama dalam aspek pembenahan birokrasi di Indonesia.

Organisasi masyarakat sendiri telah berdiri diberbagai negara di dunia dengan total lebih dari 10 juta organisasi masyarakat yang terdaftar dengan India memuncaki total organisasi masyarakat dengan jumlah 2 Juta

organisasi pada 2021 (Kalra, 2019). Sedangkan Indonesia, pada tahun 2022 setidaknya terdapat 512.997 organisasi masyarakat yang berada di Indonesia. Banyaknya penambahan kuantitas ormas dalam beberapa tahun belakangan, akan dirincikan dalam diagram berikut:

**Gambar 1. 1 Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan**



*Sumber: Data diolah 2023*

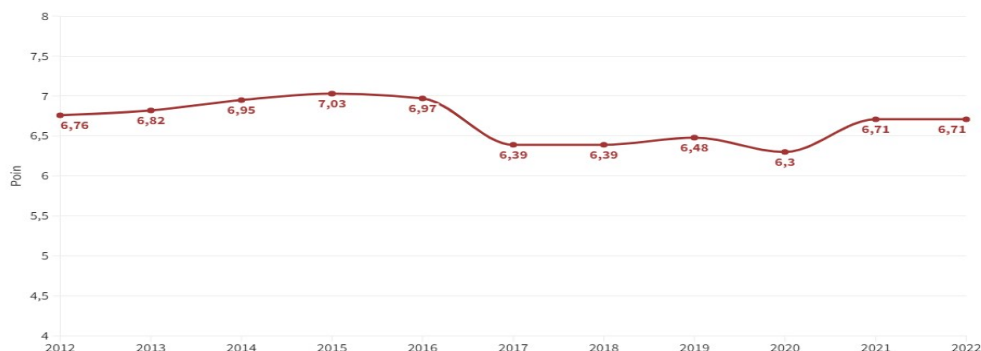
Meningkatkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat sangat penting bagi pertumbuhan organisasi jika ingin menjamin tercapainya tujuan nasional, kemajuan nasional, dan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak didirikan, para pendukung ormas di Indonesia telah sepakat bahwa organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai platform, media, atau instrumen untuk mencapai perubahan sosial. Menjadi bagian dari ormas adalah sebuah keputusan, bukan karena keadaan atau bahkan sebagai alat pendukung. Ormas bukanlah tujuan. Tujuan dari suara

kelompok massa adalah untuk mengagetkan dan menggemakan “*Silent Majority*”, yang distigmatisasi dan dibungkam selama bencana kemanusiaan terburuk di Indonesia pada tahun 1965 akibat kerusuhan politik (Khaenamkhaew, 2022).

Menurut (Gofen & Lotta, 2021) karena pentingnya peran mereka, organisasi massa didirikan atas dasar pemahaman bersama tentang perlunya membangun platform untuk mendorong pertumbuhan. Bersamaan, pemerintah dan masyarakat harus mendukung peran penting ini untuk memastikan kelompok massa dapat memenuhi misi dan tujuannya. Sebagai mitra pemerintah, organisasi kemasyarakatan harus didukung dengan memberikan arahan, dukungan, dan dorongan dalam lingkungan yang mendorong energi, kreativitas, dan dinamika di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan organisasi non-pemerintah untuk tumbuh secara mandiri dan sukarela.

Kontribusi ormas di Indonesia terhadap pembangunan negara yang sejalan dengan prinsip demokrasi juga merupakan wujud partisipasi masyarakat yang sesungguhnya melalui kelompoknya; indeks demokrasi yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit untuk mengukur tingkat demokrasi di 167 negara, dapat digunakan untuk mengukur kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Berdasarkan analisis terbaru Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia sendiri tidak mengalami banyak perubahan dan bahkan cenderung stagnan. Situasi tersebut digambarkan pada grafik di bawah ini:

**Gambar 1. 2 Indeks Demokrasi Indoensia**



Sumber : *Economist Intelligence Unit, 2022*

Nilai demokrasi Indonesia cenderung berkembang secara perlahan; bahkan dicap sebagai “Demokrasi Cacat” atau demokrasi terbatas. Secara keseluruhan, Economist Intelligence Unit menilai demokrasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara secara keseluruhan, demikian juga dengan peringkat pluralisme dan pemilu, jalannya pemerintahan, keterlibatan politik, dan hak-hak sipil. Namun penilaian budaya politik yang berada di bawah rata-rata global menjadi penyebab kembali turunnya skor demokrasi Indonesia. Penilaian terhadap rendahnya derajat budaya politik sendiri sejalan dengan kondisi sosial Indonesia; namun, karena banyak Undang-Undang yang terus menentang agama, kini mustahil menerapkan poin-poin penilaian seperti gagasan pemisahan negara dan agama. Alternatifnya, ada argumen lain yang mempengaruhi penilaian, seperti fakta bahwa kohesivitas sosial di Indonesia masih kurang seperti terlihat dari banyaknya konflik sosial terkait SARA, khususnya di kota pelajar.

**Tabel 1. 1 Unsur IDI Economist Intelligence Unit**

<b>Indonesian Democracy Index</b>	<b>Nilai</b>
Proses Pemilu dan Pluralisme	7,92/5,63
Fungsi Pemerintah	7,86/4,64
Partisipasi Politik	7,22/5,39
Kebebasan Sipil	6,18/5,37
Budaya Politik	4,38/5,38

Sumber: *Economist Intelligence Unit, 2022*

Seperti terlihat pada tabel, pergerakan indeks demokrasi Indonesia yang cenderung stagnan merupakan hasil dari sejumlah faktor yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik dalam sebuah demokrasi. Berdasarkan hipotesis Badan Pusat Statistik, sejumlah faktor diperkirakan cukup mampu menggambarkan fungsi kelompok masyarakat dalam indeks demokrasi Indonesia. Faktor-faktor ini meliputi:

**Tabel 1. 2 Indikator IDI**

<b>Indikator Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan	83,09	78,19	78,53	72,44
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	29,22	30,37	34,91	35,55

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	51,47	45,96	57,35	42,28
--	-------	-------	-------	-------

Sumber: *Economist Intelligence Unit, 2022*

Kondisi indeks demokrasi Indonesia yang cenderung stagnan sejalan dengan kenyataan yang muncul akhir-akhir ini: banyak ormas yang menyalahgunakan tujuannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta melanggar hukum. Salah satunya adalah maraknya kelompok masyarakat di masyarakat saat ini yang dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas ilegal, termasuk kerusuhan antar ormas dan kasus pemerasan, penipuan, dan pencucian uang.

Misalnya, pada tahun 2019 sekelompok oknum ormas mengutarakan tujuannya untuk kepentingan organisasi. Namun dalam menjalankan aksinya, para anggota ormas tersebut melakukan perilaku anarkis, membakar ban, meja satpam, dan tindakan anarkis lainnya. Setelah disita oleh pihak berwenang, diketahui bahwa mereka telah menemukan lima puluh (50) botol anggur, sebuah pistol air soft gun, dan barang-barang lain yang dianggap berpotensi berbahaya untuk keperluan umum. Diketahui juga bahwa operasi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa izin atau pemberitahuan sebelumnya (Rohman, 2021).

Contoh lain terjadi ketika kelompok besar di wilayah Indramayu melakukan aktivitas yang membahayakan rasa aman masyarakat. Di Mapolda Jabar, sejumlah fasilitas di antaranya lampu taman, pagar, hingga gerbang dirusak. Selain itu, mereka menaiki patung Harimau Lodaya yang menjadi lambang Polda Jabar. Lima dari dua puluh anggota kelompok massa tersebut dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah ditahan, menurut pemeriksaan urin (Purba, 2022).

Berbagai pelanggaran tersebut tentunya berbenturan dengan maksud dan tujuan ormas yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kaitannya dengan organisasi massa, yaitu kelompok non-pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pengawasan dan pengarahan pemerintah sangat berperan. Selain itu, perlu diingat bahwa masyarakat memang mengorganisir kelompok masyarakat untuk membantu pemerintah membangun negara sesuai Pancasila (Hadi, 2017).

Terdapat beragam penelitian mengenai organisasi masyarakat dan perannya dalam mewujudkan demokratisasi sebuah negara, Dilansir dari (Muhammad Ridwan Lubis, Lukman Nasution, 2022), Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi..

Melihat hal tersebut, maka muncullah perdebatan terhadap keberadaan ormas yang dikutip pada (Thamrin, 2020), bahwa *“Amid the debate of whether community-based organizations created by the government can increase citizen participation in public affairs, the context of the existence of community organizations also determines the ability of community organizations to play their roles such as the construction of legal formal and construction of relationships built between a community organization and the arena of policymaking”*, yang berarti keberadaan ormas menjadi perdebatan apakah mereka merupakan bentukan pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi warga dalam urusan publik. Padahal, semestinya organisasi kemasyarakatan mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dan menciptakan suasana yang lebih damai melalui koordinasi dengan Pemerintah (Soska et al., 2016).

Sejalan dengan makna pembangunan yang telah disebutkan diatas, pembangunan sendiri merupakan inisiatif dari pemberdayaan yang digunakan untuk memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi suatu komunitas (Darma, 2022), mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lain maka dari sekumpulan orang dengan tujuan yang sama di bentuklah sebuah organisasi masyarakat yang mewadahi tujuan dari kelompok tersebut (Ressler et al., 2021).



Upaya demokratisasi melalui organisasi masyarakat atau N-GO dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti (Bloodgood et al., 2014): *Pertama*, melalui partisipasi dalam gerakan sosial berbasis isu, organisasi masyarakat memainkan peran aktif dalam menyuarakan protes terhadap pemerintahan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. *Kedua*, organisasi masyarakat membuktikan dirinya sebagai sumber rekrutmen dari para pemimpin politik untuk berbagai posisi di kabinet maupun lembaga-lembaga Pemerintah lainnya.

*Ketiga*, adanya “*N-Go liaison disk*” di setiap departemen Pemerintah yang mana organisasi masyarakat membantu dalam memusatkan sumber daya dan kapasitasnya untuk pendayagunaan yang lebih efektif. *Keempat*, organisasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi terlebih dalam tingkat distrik atau biasa disebut tingkat lokal. *Kelima*, organisasi masyarakat memainkan peran dalam menciptakan gerakan sosial yang bersifat kontemporer dengan membentuk agenda-agenda politik berbasis isu dalam masyarakat yang didominasi oleh debat politik yang masih berbasis patronase (Haseda et al., 2019).

*Non-governmental organizations* pada beberapa negara memainkan peran yang sangat krusial dalam membangun demokratisasi negaranya. Sebagai contoh di Filipina, organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang dibenturkan dengan *socio-cultural* yang berasal dari perilaku masyarakat, keadaan politik yang tidak menentu dan lainnya (Alves, 2020). Berdasarkan fakta, organisasi

masyarakat di Filipina pasca pemerintahan Ferdinand Marcos tepatnya pada tahun 1998 mampu berkolaborasi dengan pemerintahan secara signifikan, misalnya Presiden Fidel Ramos yang mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dalam mekanisme berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perdamaian di Mindanao serta pelibatan organisasi masyarakat yang diisi oleh mayoritas masyarakat miskin yang membantu pengembangan kebijakan nasional.

Sektor masyarakat sipil telah membuat langkah besar selama 2 dekade terakhir. Organisasi masyarakat telah meningkatkan efektivitasnya melalui pembangunan jejaring dan koalisi, mengkampanyekan reformasi kebijakan, mengadopsi standar praktik yang baik, dan memajukan “pembangunan berkelanjutan” sebagai visi pemersatu untuk semua organisasi (Orbista, 2016).

Contoh negara lainnya yaitu India dengan 2 juta ormasnya, organisasi masyarakat di India dinilai memainkan peran penting dalam program pembangunan serta proses menjaga hubungan hangat kebijakan publik dan penegakan hukum sosial dengan berkolaborasi dengan Pemerintah yang tentunya merupakan wujud demokrasi partisipatif (Pagheh, 2019). Kapasitas dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat di India yang dinilai mampu menjangkau hingga ke ujung negeri telah diakui oleh Pemerintahan setempat.

Sedangkan dalam urusan pemerintahan, organisasi masyarakat telah terlibat dalam banyak hal dan pada tingkatan yang berbeda-beda. Termasuk dalam kerjasama merancang, menerapkan dan memantau program, kebijakan dan legislasi dan pemberian peran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat untuk menjadi inovator, problem solver dan penyedia layanan sosial. Secara keseluruhan, pendekatan antara pemerintah dan masyarakat sipil di India bervariasi, di mana sebagian besar hubungan bersifat kompleks namun praktis dan berwawasan ke depan. Fokus yang lebih besar pada rasa saling menghormati dan kepercayaan antara kedua kelompok pemangku kepentingan dapat meningkatkan hubungan ini (Habib, 2020).

Tentunya contoh nyata yang diberikan tidak hanya berpaku pada keberhasilan dari organisasi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan organisasi serta berkolaborasi dengan pemerintah. Organisasi masyarakat di negara tetangga, Malaysia, seringkali menghadapi kendala dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Persaingan yang bersifat destruktif untuk memperoleh sumber daya mengikis reputasi sektor dan efektivitas kegiatan organisasi masyarakat dalam pandangan masyarakat secara umum (Abiddin et al., 2022). Akibatnya, ada kecurigaan yang meluas terhadap organisasi masyarakat, budaya kerahasiaan, dan kurangnya transparansi. Banyak organisasi masyarakat, besar dan kecil, ikut campur di tingkat masyarakat tanpa melakukan latihan pemetaan masyarakat dan melaksanakan proyek tanpa memperhatikan inisiatif masyarakat yang

sedang berlangsung. Banyak komunitas telah dicirikan oleh ketegangan antara organisasi masyarakat, yang satu berkelahi dengan yang lain akibat dari perebutan sumber daya, kondisi ini disinyalir disebabkan tata kelola pemerintahan yang buruk yang membuat peran dari organisasi masyarakat yang tidak efisien (Beh et al., 2020).

Sementara di Indonesia sinergitas yang dilakukan antara ormas dan pemerintah dituangkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum. Adapun beberapa contoh dari sinergitas ormas dan pemerintah diantaranya:

**Tabel 1. 3 Sinergitas Ormas dan Pemerintah**

No	Nama	Bentuk Sinergitas
1	Muhammadiyah	Kerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, dan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan melalui program Tabungan Rumah Tapera bagi peserta pekerja mandiri Muhammadiyah (Kemenko PMK, 2023)
2	Ikatan Ahli Kesehatan	Kerjasama dengan IAKMI dilakukan dengan tujuan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

	Masyarakat Indonesia (IAKMI)	nomor 440/5538/S tentang kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan termasuk Lembaga swadaya masyarakat dalam rangka percepatan penanganan covid-019 di daerah (JDIH Denpasar, 2020).
<b>3</b>	Sentra Komunikasi Mitra Polri	Kerjsama dengan Senkom dilakukan dengan tujuan menjaga kondusifitas masyarakat menjelang pemilu ataupun setelah pelaksanaan pemilu, bersama dengan Forkopimda dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan pihak-pihak yang menjadi penanggungjawab pengawasan ormas di daerah yang rawan dimanfaatkan menjelang pemilu (Puryono, 2023)
<b>4</b>	Lembaga Bantuan Hukum	Kerjsama dengan LBH dilakukan dengan tujuan dapat membawa banyak manfaat dalam peningkatan layanan bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat (Pemkot Yogyakarta, 2022)

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Peran Kementerian Dalam Negeri dalam kondisi ini sangat dibutuhkan sebagai media penghubung antara ormas yang ada di Indonesia kepada Pemerintah. Sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas,

sinergitas yang dilakukan antara pemerintah bersama ormas tidak hanya terpaku pada satu aspek kehidupan (Pambudi & Milla, 2019). Namun, dengan adanya ormas, pemerintah mendapatkan partner yang tepat yaitu ormas yang telah terklasifikasikan sesuai dengan AD/ART dari masing-masing ormas. Misalnya yang dilakukan oleh pemerintah yang menggandeng IAKMI yang berfokus pada kesehatan untuk meminimalisir atau meredam angka penyebaran Covid-19 (JDIH Denpasar, 2020). Tidak hanya itu, sinergitas yang dilakukan ormas bersama pemerintah mampu menjangkau seluruh sektor kehidupan tergantung kepentingan yang akan dicapai pemerintah baik dari sektor ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lainnya..

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum menjadi dasar dari adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat melalui ormas. Adanya regulasi tersebut membawakan pendalaman penelitian dengan fokus **“SINERGITAS PEMERINTAH BERSAMA ORMAS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Menurut (Sugiyono, 2019) rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Ketika menyusun sebuah rumusan masalah harus

memperhatikan teknik perumusan masalah. Sehingga dalam melaksanakan penelitiannya tidak mengalami kesalahan atau kegagalan. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan digunakan, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi masyarakat melalui ormas dalam mewujudkan demokratisasi?
2. Bagaimana bentuk sinergitas yang dilakukan pemerintah bersama ormas dalam mewujudkan demokratisasi?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Menurut (Fadli, 2021) Tujuan penelitian adalah langkah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kontribusi masyarakat melalui ormas dalam mewujudkan demokratisasi.
2. Mengetahui bentuk sinergitas yang dilakukan pemerintah bersama ormas dalam mewujudkan demokratisasi.

#### 2) Manfaat Penelitian

Menurut (Elidawaty Purba, 2021) manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

#### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menawarkan ide-ide untuk pembaharuan pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan, yang mampu menjadi referensi untuk penelitian kedepannya.

#### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis berupa tambahan wawasan serta pengalaman langsung yang diperoleh terkait dengan peran serta organisasi masyarakat di Indonesia dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Selain itu manfaat praktis yang diharapkan diperoleh Pemerintah berupa penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dari pemerintah dalam proses penetapan kebijakan.

### 1.4. Definisi Konseptual

#### 1) Sinergitas

Secara etimologi, kata sinergitas berasal dari kata sinergi yang berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan antar unsur atau instansi yang menghasilkan satu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri (Aritonang, 2018). Selain itu, istilah sinergitas diartikan sebagai membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku



kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas (Engkus et al., 2021). Lebih lanjut, menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergitas diartikan sebagai sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual.

Sinergi bukanlah suatu yang dapat dipegang oleh tangan manusia tetapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja secara sinkron satu sama lainnya sehingga mereka dapat bergerak dan berikir menjadi satu kesatuan (Rahmawati et al., 2021). Jika sub-sub sistem bekerjasama, maka hasil yang diperoleh akan lebih efektif dibandingkan pengerjaan secara masing-masing.

## 2) Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan ormas sendiri bisa ditemukan dalam berbagai tingkatan yang ada di masyarakat (Ima Ananda, 2021).

Keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Fungsi ormas ditekankan pada peningkatan partisipasi dan juga pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang telah dirancang sebelum-sebelumnya (Y. A. Wibowo, 2021).

### 3) Demokratisasi

Sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum (Bayham, 2023), dimana salah satu negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia.

Jika demokrasi dipandang dari segi urgensitas, maka demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Atas dasar tersebut, penegakan demokrasi di Indonesia harus terus ditegakkan (Pancasila dan Kewarganegaraan & Tallo Suardi, 2018).

Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi juga membuktikan

pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Kemungkinan terjadinya konflik antar warga masyarakat ditekan. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut (Nugroho, 2015) :

1. Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih
2. Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara karena Negara demokrasi mengakui supremasi hukum.
3. Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian
4. Memungkinkan setiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi.

### 1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan prosedur yang memungkinkan penegasan ada atau tidaknya realitas tertentu sebagaimana yang telah digambarkan menurut konsepnya yang mana dalam kajian ini berfokus pada urgensi kontrol terhadap organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai wujud menjaga pilar demokrasi. Definisi operasional berfungsi untuk mengoperasikan konsep-konsep yang ada sehingga jelas variabel yang diperlukan, definisi operasional sendiri terdiri dari beberapa indikator yang akan diteliti dan diukur sehingga dapat diketahui dengan jelas variabelnya. Oleh karena itu indikator variabel dari definisi operasional adalah sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Oakley (1991:9) terdapat lima indikator dari adanya partisipasi masyarakat dalam demokratisasi, diantaranya:

- a. Adanya kontribusi
- b. Adanya pegorganisasian
- c. Peran Masyarakat
- d. Motivasi Masyarakat
- e. Tanggungjawab Masyarakat

#### 2. Sinergitas

Menurut Doctoroff (1997:6) dalam menjalankan sinergitas, terdapat sejumlah indikator berupa:

- a. Komunikasi
- b. Umpan Balik
- c. Kepercayaan

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya terkait dengan suatu obyek yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk menjabarkan suatu kondisi, kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal untuk menjawab sebuah pertanyaan ataupun persoalan yang sedang dibahas.

Jenis metode penelitian deskriptif kualitatif juga diterapkan atau digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala serta peristiwa yang biasanya bertitik tumpu untuk memecahkan masalah dalam bidang-bidang tertentu. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci serta mendalam mengenai potret kondisi alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi (Fadli 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan studi kasus, studi kasus dapat dikatakan sebagai suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Mudjia Rahardjo, 2019).

Sebagai sebuah pendekatan, kunci dari studi kasus ialah memungkinkan untuk menyelidiki suatu kondisi sosial untuk memberi wawasan (pengetahuan) dalam proses yang menjelaskan bagaimana situasi tertentu sedang berlangsung atau terjadi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini digambarkan sebagai metodologi yang fleksibel dan paling umum digunakan dalam penelitian sosial. Adapun pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian berupa “bagaimana” dan “mengapa”.

#### 1) Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat. Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Direktorat Organisasi Kemasyarakatan. Pemilihan tempat ini diambil karena wilayah tersebut cocok untuk membantu penulis dalam menyelesaikan

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun waktu atau tahapan dalam penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. 4 Waktu Pelaksanaan dan Kegiatan Penelitian**

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
Persiapan				
Observasi Lapangan				
Penelitian dan Olah Data				
Menyusun Laporan Penelitian				

2) Sumber Data

Adapun peneliti menggunakan dua macam jenis data, diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018) sumber data utama atau primer adalah data yang diterima atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti berupa data dengan keaslian yang dapat di pertanggungjawabkan atau data yang bersifat baru atau up to date. Dalam kasus ini data yang akan dimanfaatkan berasal dari wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti anggota-anggota yang berkerja di Kementerian Dalam Negeri khususnya yang diposisikan pada bagian Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum.

## b. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018), sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari semua sumber yang ada, dalam artian merupakan tangan kedua yang berarti data sekunder diartikan sebagai sumber data penelitian yang didapatkan dengan cara tidak langsung atau melalui media perantara. Disini, penulis berperan sebagai pihak kedua karena tidak mendapatkan data secara langsung. Adapun sajian data sekunder yang digunakan adalah persepsi masyarakat yang didapat melalui media online, data berupa jumlah organisasi di Indonesia dan kondisinya saat ini sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi yang diartikan sebagai salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun (Nurdin, 2019). Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat mengkaji secara langsung terkait apa urgensi pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap organisasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya dan jalannya dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

#### b. Wawancara



Adapun wawancara disini di maksudkan untuk lebih mudah mendapatkan informasi lebih rinci pada narasumber terkait. Proses wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam melakukan studi pendahuluan dan pencarian data-data yang dibutuhkan secara lebih dalam. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *in depth interview* yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti berupaya mengumpulkan data maupun dokumen penunjang, seperti arsip, rekaman suara, foto dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan yang dapat memberikan data informasi yang terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, serta pejabat dan staf yang berkaitan pada pengawasan Pemerintah terhadap organisasi masyarakat di Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni sebagai pengumpulan data yang terkait dengan urgensi pengawasan terhadap organisasi masyarakat di Indonesia. Dimana peneliti melakukan

observasi dan wawancara terhadap informan terkait untuk melakukan validasi dan klarifikasi informasi atas data yang telah didapat. Maka dari itu, analisis data yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti membuat ringkasan, memilah dan memfokuskan hal-hal penting yang terdapat dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan. Adapun dalam penelitian ini, baik dari data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian direduksi oleh peneliti untuk mempermudah dalam memahami data dan lebih difokuskan pada pembahasan pokok dan pada penjelasan yang perlu dijelaskan secara rinci untuk mendukung hasil serta diskusi dalam Urgensi pengawasan Pemerintah terhadap organisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan demokratisasi di Indonesia.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang disertai dengan beberapa tabel dan diagram serta data-data gambar yang mendukung penelitian. Dimana penelitian menguraikan hasil wawancara bersama informan yang telah disesuaikan dengan indikator maupun fenomena sosial yang telah ditemukan di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan saling mengikuti antara data satu dengan data lainnya sehingga memperoleh hasil data yang valid sesuai dengan analisis penelitian. Dimana proses penarikan kesimpulan awal dapat bersifat sementara sebelum adanya bukti-bukti yang valid serta konsisten saat di lapangan. Maka dari itu, peneliti perlu mengumpulkan data yang kuat dan valid agar kesimpulan akhir dapat terumuskan dengan jelas dan baik

